

PENGEMBANGAN KAPASITAS PROGRAM E-WARONG KUBE OLEH DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Agung Prambudi¹, Rudi Subiyakto², Edison³
Agungprambudi88@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

One of the poverty alleviation programs from the government is the E-Warong (Electronic Mutual Cooperation Shop) KUBE program as a means to help the community of the PKH Program in taking non-cash assistance from the government. E-Warong KUBE program is run by the PKH program community as managers with the aim of being able to improve the economy of the E-Warong KUBE management community. However, there are still problems faced by managers in developing E-Warong KUBE. The purpose of this study was to determine the capacity building of the E-Warong KUBE program by the Social Department Tanjungpinang City in overcoming existing problems. By using indicators, namely dimensions of human resource development, dimensions of organizational strengthening, dimensions of institutional reform. The research method used is a descriptive type with a qualitative approach. Observation data collection techniques, interviews, documentation. The results of this study indicate that the capacity building of the program E-Warong KUBE has not been going well. It can be seen from the indicators used in human resource development that have not been going well, there is no continuous training from the government, there is still need to improve the applicable rules in order to benefit E-Warong KUBE and need to carry out activities or training to develop the capacity of managers and assistants after the transfer of the program to the Management Source of Funds and Social Assistance.

Keywords: Capacity Building, Program, E-Warong KUBE

I. Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda prioritas pembangunan nasional sejak lama. Berbagai kebijakan, stategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi kesenjangan antara pertumbuhan dan pemerataan di setiap daerah di Indonesia. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat atau *conditional cash transfer* kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Sasaran PKH merupakan keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil atau menyusui, serta anak berusia nol (0) sampai enam (6) tahun.

Terkait hal ini dalam (Mawardi et al., 2017:2), Mensos (Menteri Sosial) memberikan instruksi bahwa semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar outcome (keluaran)nya memberikan dampak luas, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pemberdayaan pendamping PKH dan masyarakat yang menjadi dampingannya, dan menjadikan mereka sebagai pelaku dalam sistem keuangan inklusif dan proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus jelas dan terarah, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya. Dari berbagai hal tersebut, pada Juni 2016 Kemensos mengujicobakan bansos nontunai dengan menganut prinsip yaitu, semua penerima bantuan akan memiliki rekening tabungan bank, semua bansos (tunai dan *e-voucher*) akan masuk ke dalam rekening tersebut, pencairan bantuan dilakukan melalui agen, outlet, atau toko, dan pencairan bantuan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Secara operasional, penyaluran bansos secara non-tunai diwujudkan dalam bentuk program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Penerima manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yaitu keluarga yang terdapat di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. (Effendy, 2020:3) Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000,-/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000,-/KPM/bulan.

Pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu Elektronik Warung gotong-royong (E-Warong) Kelompok Usaha bersama (KUBE). KUBE di bidang jasa yang selanjutnya disebut Kube Jasa adalah Kube yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut E-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Konsep pengembangan kapasitas menurut Merilee S.Grindle dalam (Fatimah, 2018:187-189) mengemukakan bahwa dalam melakukan Capacity Building terdapat tiga dimensi yaitu: a) Dimensi Pengembangan SDM; b) Dimensi Penguatan Organisasi; c) Dimensi Reformasi Kelembagaan. Dalam hal ini beberapa indikator teori dari Merilee S. Grindle memiliki keterkaitan dengan konsep penelitian yaitu dalam pengembangan SDM yaitu pembinaan atau pun pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang telah menggali potensi SDM untuk bisa berwirausaha atau pun berbisnis dengan sarana yang telah di berikan, dalam penguatan organisasi yaitu konsep ataupun pengembangan yang dilakukan oleh dinas sosial terkait penguatan E-Warong KUBE untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan pengelola E-Warong serta dalam konsep reformasi kelembagaan melakukan inovasi atau perubahan dalam pengembangan E-Warong KUBE secara regulasi ataupun aturan dalam membenahi E-Warong KUBE.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, pada tahun 2018 Dinas Sosial meresmikan E-Warong dengan sebelumnya memberikan modal kepada E-Warong yaitu Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) bantuan yang diberikan kepada anggota Kube yang akan menjadi E-Warong. Hasil verifikasi setelah memenuhi persyaratan sebagai Kube Jasa dan E-Warong Kube PKH ditetapkan sebagai penerima BPSU senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang. Kemudian diberikan bantuan Kube senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja.

Selanjutnya penerima Program Keluarga Harapan mendapatkan bantuan dana secara non-tunai setiap bulan yang akan di tukarkan dengan sembako di E-Warong. Maka, E-Warong KUBE akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya yang dijualbelikan kepada penerima program

keluarga harapan setiap bulannya. Namun dalam keberlangsungannya E-Warong KUBE pada saat ini sebagian besar telah berjalan, tetapi memiliki masalah dan kendala yang berbeda-beda dalam keberlangsungannya.

Meskipun ada E-Warong yang telah berjalan dan dapat dikatakan sudah berkembang, beberapa kendala dan masalah yang peneliti dapatkan pada saat observasi yaitu, ada yang bermasalah dengan manajemen keuangannya seperti dalam proses pembukuan yang masih belum teratur, keterampilan dalam penggunaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang masih mendasar, peran pendamping yang kurang berpartisipasi terhadap pengembangan E-Warong KUBE, tidak adanya pelatihan berkelanjutan dari Dinas Sosial untuk mengembangkan E-Warong KUBE dan kurangnya pengawasan dan kontrol dari dinas sosial terhadap pengembangan E-Warong KUBE. Dari beberapa hal yang telah disebutkan masih adanya kekurangan dalam keberlangsungan E-Warong berkaitan dengan keterampilan, kemampuan dan kapasitas pada pengelola E-Warong tersebut. Sehingga dari program E-Warong ini peneliti lebih tertarik memfokuskan penelitian pada pengembangan kapasitas dalam program integratif Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas dari Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungpinang dalam mengatasi permasalahan yang ada.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, langkah ini harus mendeskripsikan suatu objek fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif beserta isi kutipan-kutipan data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.

Fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai pengembangan kapasitas program elektronik warung gotong-royong (E-Warong) kelompok usaha bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian pengembangan kapasitas program elektronik warung gotong-royong (E-Warong) kelompok usaha bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang menjadi Objek penelitian yaitu E-Warong KUBE.

Agar dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *behavioral checklist* yaitu metode yang memberikan keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberi tanda jika perilaku yang diobservasi muncul. Peneliti akan melakukan pengamatan dengan melihat aktivitas pengelola dalam menjalankan E-Warong, kondisi E-Warong, dan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping E-Warong terhadap keberlangsungan E-Warong. Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi secara langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan informan terkait langsung dan mengetahui serta memahami objek penelitian.

Teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini untuk mendapatkan data primer dari responden atau informan. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Koordinator PKH Kota Tanjungpinang, Pendamping E-Warong KUBE PKH dan Pengelola E-Warong KUBE PKH. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang merujuk kepada fokus penelitian dan objek penelitian. Menurut Nasution dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti

dan hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau melalui arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Dalam studi dokumentasi alat-alat yang dapat digunakan yaitu kamera, *handphone* dan lain-lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Aktivitas dalam analisis data yang peneliti gunakan yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau membuat kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warung KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. E-Warung KUBE dibentuk dan dikelola dengan beranggotakan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan untuk membantu perekonomian anggota pengelola E-warung KUBE. Pada awal tahun 2018 E-warung KUBE di Kota Tanjungpinang dibentuk sebanyak 5 E-Warung, kemudian Kementerian Sosial meminta penambahan E-Warung KUBE sebanyak 7 E-warung KUBE. Sehingga pada saat ini E-Warung KUBE di Kota Tanjungpinang berjumlah 12 E-Warung KUBE yang tersebar di setiap Kelurahan di Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaan E-Warung KUBE di Kota Tanjungpinang dapat dikatakan sebagian besar telah berjalan, tetapi masih ada E-Warung KUBE yang memiliki masalah dan kendala yang berbeda-beda dalam keberlangsungannya.

Pengembangan kapasitas organisasi menurut Morgan dalam (Andi Samsu Alam & Ashar Prawitno, 2015: 94) yaitu sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector dan sistem yang lebih luas. Elektronik warung gotong royong (E-Warung) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program untuk membantu perekonomian masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat di Kota Tanjungpinang.

Program ini telah terlaksana sejak awal tahun 2018 yang berawal dari 5 E-Warung sampai saat ini 12 E-Warung KUBE yang terdapat di Kelurahan yang ada di Tanjungpinang. Program dari pemerintah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian pengelola E-Warung KUBE terutama yang menyangkut kelangsungan hidupnya dari keuntungan yang diperoleh dari mengelola E-Warung KUBE. Pemberian Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) dengan total Rp. 30.000.000,- kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) jasa yang telah terbentuk dan digunakan untuk pembangunan, modal usaha dan modal kerja dari pemerintah yang digunakan pada awal berdirinya E-Warung KUBE. Kemudian dari keuntungan yang di peroleh setiap bulan yang akan digunakan untuk perputaran modal pada bulan berikutnya.

Dalam pelaksanaannya E-Warung KUBE di Tanjungpinang terdapat beberapa E-Warung yang dapat dikatakan berkembang dengan jumlah stok barang yang banyak mengisi E-Warung tidak hanya sembako namun juga barang-barang kebutuhan sehari-hari, namun masih ada E-Warung yang tidak dapat mengisi stok sembako atau barang lainnya di E-Warung dengan jumlah yang banyak karena berbagai permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini apabila Sumber Daya Manusia sebagai penggerak atau pelaksana dalam organisasi memiliki kemampuan dan diberikan pelatihan, pengarahan ataupun pembinaan secara tepat maka SDM dapat menjalankan organisasi dengan lebih baik sehingga tercapai tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut Merilee S.Grindle dalam (Fatimah, 2018:187-189) mengemukakan bahwa dalam melakukan *Capacity Building* terdapat tiga dimensi yang masing-masing mempunyai fokus dan tipe kegiatan yang berbeda-beda. Dimensi itu dapat dikemukakan sebagai berikut Dimensi pengembangan SDM, Dimensi penguatan organisasi, Dimensi reformasi kelembagaan. Peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai hasil peneliti yang telah dilakukan dan mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas dalam program integratif elektronik warung gotong royong (E-Warong) Kelompok usaha bersama (KUBE) di Kota Tanjungpinang. Adapun hasil peneliti ini diperoleh melalui observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan:

Dimensi pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan indikator terpenting dalam organisasi karena perannya sebagai subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional organisasi. Pengembangan sumber daya manusia menurut Silalahi dalam (Kasmawati, 2019:396) adalah upaya berkelanjutan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan latihan, dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle dalam (Fatimah, 2018:185), menjelaskan bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan kinerja pegawai. Pengembangan SDM juga merupakan proses pengembangan kemampuan seorang individu dan menemukan serta memanfaatkan potensi yang ada. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan E-Warong KUBE melalui pelatihan dan pembinaan. Sumber Daya Manusia dalam program ini yaitu penyelia atau pendamping dan pengelola E-Warong KUBE.

Dalam pelaksanaan E-Warong pada tahapan pengembangan SDM, pelatihan dan pembinaan masih belum berjalan secara berkelanjutan dan pelatihan hanya pernah dilakukan satu kali yaitu tentang penggunaan dasar mesin *Electronic Data Capture (EDC)* pada saat sebelum pembukaan E-Warong. Pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa belum ada pelatihan berkelanjutan setelah E-Warong KUBE berjalan tidak adanya pelatihan berkelanjutan untuk membantu pengelola E-Warong KUBE agar lebih paham dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi kesalahan (*error*) dalam mesin EDC tersebut. Pelatihan untuk pembukuan keuangan juga tidak ada untuk para pengelola E-Warong dan juga tidak adanya pelatihan tentang mengembangkan E-Warong sehingga belum maksimalnya usaha untuk memberikan pembekalan kepada para pengelola dalam menjalankan E-Warong. SDM lain yang terlibat dalam program E-Warong KUBE ini yaitu penyelia atau pendamping E-warong. Belum adanya pelatihan atau pembinaan untuk para pendamping E-Warong KUBE dari Dinas Sosial dalam membantu pengelola untuk mengembangkan E-Warong. Dalam Permensos juga tidak ada petunjuk teknis atau pun tugas pokok dan fungsi dari pendamping, sehingga para pendamping hanya diberikan tugas seperti mengawasi, mendampingi dan membantu E-Warong pada saat ada permasalahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengembangan SDM ini belum berjalan dengan maksimal, dimana dari pihak pemerintah belum memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada pengelola E-Warong dan tidak adanya pelatihan atau pembinaan kepada pendamping. Sehingga dalam pelaksanaannya E-Warong KUBE tidak berkembang seperti yang diharapkan. Pelatihan dan pembinaan mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan sumber daya manusia untuk pengelola maupun pendamping E-Warong KUBE untuk mengembangkan E-Warong. Dari permasalahan yang telah dijelaskan maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan untuk dapat membantu dan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengelola E-Warong KUBE.

Pada tahap ini perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk pengelola E-Warong dalam menjalankan dan mengembangkan E-Warong. Pelatihan yang dilakukan bisa bekerja sama dengan Dinas Koperasi atau mengundang para pengusaha yang sudah sukses untuk memberikan pelatihan

berupa cara menyusun pembukuan keuangan, cara mengelola usaha atau bisnis yang tepat dan cara menghasilkan produk untuk dijual di E-Warong. Pembinaan dan pelatihan kepada pendamping juga diperlukan agar dalam menjalankan tugasnya pendamping dapat membantu membuat inovasi dalam mengembangkan E-Warong.

Dimensi Penguatan Organisasi.

Menurut Prof Dr. Sondang P.Siagian dalam (Kasmawati, 2019:396-397) mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Menurut Merilee S. Grindle dalam (Fatimah, 2018:187) mengetakan dimensi penguatan organisasi, dengan berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya kerja, komunikasi, dan struktur organisasi. Organisasi dalam program ini yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) jasa yang dibentuk untuk menjalankan E-Warong. KUBE jasa yang dibentuk merupakan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), persyaratan itu merupakan langkah pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat PKH yang mengelola E-Warong.

Organisasi dalam program ini yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) jasa yang dibentuk untuk menjalankan E-Warong. KUBE jasa yang dibentuk merupakan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), persyaratan itu merupakan langkah pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat PKH yang mengelola E-Warong. Setelah terbentuk KUBE jasa tersebut kemudian mempersiapkan tempat yang akan di jadikan E-Warong sebagai tempat bertransaksi jual-beli dan memulai berjualan pada E-Warong. Berdasarkan Permensos. No.25 tahun 2016 pada pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan Pemilik rumah/tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harus menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.

Dalam Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Permensos No 25 tahun 2016 pasal 11 ayat (2) memuat, a) kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan; dan b) tidak menuntut biaya sewa dan/atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat E-Warong KUBE PKH. Dalam pengembangan organisasi E-Warong ini terdapat permasalahan yaitu uang yang seharusnya digunakan untuk membeli berbagai barang untuk mengisi e-warong dan mengembangkan E-Warong, tetapi karena pindah tempat E-Warong maka uang tersebut digunakan untuk pembangunan E-Warong. Dalam pelaksanaan E-Warong pengelola dan pendamping tidak dapat menuntut apabila suatu waktu lokasi E-warong yang digunakan pindah ke tempat lain, karena dalam surat pernyataan yang telah dijelaskan di atas dalam Permensos. No 25 tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan tidak ada yang menjelaskan untuk ganti rugi bagi pemilik tempat E-Warong.

Dalam pelaksanaan penguatan organisasi memiliki indikator perlengkapan personil, dalam Permensos No 25 tahun 2016 yang mengatakan, Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (a) terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia. Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan. Dari hal ini masih terdapat E-Warong yang tidak maksimal dalam kelengkapan anggota yang telah di tetapkan, sehingga pada saat transaksi sembako perlu menambah orang untuk membantu proses pengemasan dan pembagian sembako tersebut. Pada dimensi penguatan organisasi E-Warong masih ada kendala dan hambatan yaitu uang keuntungan yang didapatkan oleh E-Warong digunakan untuk membangun E-Warong di tempat yang baru dan juga terjadi nya persaingan dengan pihak swasta yaitu RPK dan E-Warong yang membuat keuntungan menjadi terbagi untuk kedua pihak serta kelengkapan dari personil atau anggota E-Warong KUBE yang tidak maksimal sehingga perlu menambah orang untuk membantu proses pembagian sembako tersebut kepada masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada dimensi ini sebaiknya pemerintah membuat surat pernyataan baru untuk pemilik tempat E-Warong apabila tidak ingin tempatnya digunakan lagi untuk E-Warong untuk memberikan uang ganti rugi untuk membantu pembangunan di lokasi yang baru. Sebaiknya untuk mengatasi persaingan yang terjadi antara RPK dan E-Warong pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada KPM untuk mengambil bantuan di E-Warong. Terkait keanggotaan dalam E-Warong KUBE sebaiknya pemerintah memberikan arahan terkait tugas, tanggung jawab, dan keuntungan menjadi pengelola E-Warong kepada keluarga PKH sehingga keanggotaan dalam E-Warong menjadi 10 orang.

Dimensi Reformasi Kelembagaan.

Reformasi menurut KBBI yaitu perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau Negara. Reformasi Kelembagaan atau Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), pelaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dengan reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan dengan maksimal agar mencapai sasaran program atau kegiatan.

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Fatimah, 2018:187) mengatakan dimensi reformasi kelembagaan, dengan fokus kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi. Dalam pelaksanaan program E-Warong KUBE tidak hanya perlu dilakukan pengawasan dan kontrol dari pemerintah, namun juga perlu dilakukan pembaharuan atau perubahan untuk mengatasi permasalahan dalam mengembangkan E-Warong KUBE. Dalam pedoman umum Sembako (2020), menjelaskan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Sembako di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan program. Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing.

Dalam Pedoman Umum Program Sembako(2020) adapun Komponen Pemantauan dan Evaluasi Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap: a) Proses pembukaan rekening KPM; b) Proses registrasi/distribusi KKS kepada KPM; c) Proses penggantian KPM jika diperlukan seperti yang telah diatur dalam proses penggantian KPM yang telah dijelaskan sebelumnya; d) Realisasi penyaluran dana program Sembako dari Bank Penyalur ke rekening/sub-akun uang elektronik penerima manfaat; e) Sebaran dan keterjangkauan E-Warong untuk KPM; f) Ketersediaan dan harga bahan pangan di E-Warong dan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar secara umum; g) Kepatuhan E-Warong dalam menjual bahan pangan kepada KPM; h) Kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan menggunakan KKS di E-Warong; i) Kinerja infrastruktur teknologi perbankan dan E-Warong, seperti mesin EDC, kekuatan sinyal, ketersediaan jaringan, dan alat penunjang lainnya.

Program E-Warong KUBE ini merupakan Program Kementerian Sosial yang kemudian memberi tanggung jawab kepada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk pelaksanaannya. Dalam reformasi kelembagaan dapat dilakukan penataan ulang terhadap sistem penanggung jawab suatu program agar dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Berbagai kekurangan dan hambatan yang terjadi pada E-Warong merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Sosial untuk membantu memperbaikinya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tetap ada, namun yang pengelola butuhkan yaitu pelatihan formal dalam mengembangkan E-Warong. Dalam hal ini perlu perubahan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial untuk bisa mengembangkan E-Warong.

Dalam dimensi ini sudah dilakukan pengawasan dan kunjungan dari Dinas Sosial untuk melihat kondisi E-Warong KUBE di Tanjungpinang, tetapi belum ada pelatihan resmi berkelanjutan dari Dinas Sosial untuk mengembangkan E-Warong. Perubahan dan perbaikan juga akan dilakukan

oleh Dinas Sosial dengan memindahkan program E-Warong ini ke bidang Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial supaya kegiatan pengembangan E-Warong lebih maksimal karena dikelola pada satu bidang. Pada dimensi ini diharapkan setelah perpindahan program E-Warong KUBE ke Bidang Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial akan melakukan kegiatan atau pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan kapasitas dari pengelola dan pendamping E-Warong KUBE. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Dinas Sosial membuat aturan atau regulasi teknis seperti durasi pengawasan, teknik pengawasan dan tim pengawasan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas E-Warong KUBE di Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya sejauh ini belum optimal. Adapun berdasarkan indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, dimensi pengembangan SDM, dalam dimensi ini belum berjalan dengan maksimal dan sudah dilakukannya pelatihan pada awal sebelum berjalannya E-Warong dari Pihak Bank melalui Dinas Sosial kepada pengelola E-Warong untuk menjalankan E-Warong. Tetapi tidak ada pelatihan berkelanjutan untuk membantu pengelola mengembangkan E-Warong. Tidak ada pelatihan atau pembinaan kepada pendamping E-Warong untuk mengembangkan E-Warong yang membuat tidak ada inovasi untuk mengembangkan E-Warong termasuk pendamping yang tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas dalam menjalankan usaha atau bisnis. Dimensi penguatan organisasi, pada dimensi penguatan organisasi ini belum berjalan dengan maksimal, disebabkan masih terdapat permasalahan pada E-Warong. Terjadinya pindah lokasi E-Warong membuat pengelola menggunakan uang keuntungan untuk membangun kembali E-Warong di lokasi baru karena didalam surat pernyataan tidak ada tertulis untuk mengganti uang pembangunan E-Warong. Adanya regulasi baru dari Kementerian membuat peluang bagi pihak swasta dengan membuka Rumah Pangan Kita (RPK) yang membuat keuntungan E-Warong menjadi menurun tidak seperti awal menjalankan E-Warong. Dimensi reformasi kelembagaan, Sudah adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan mengunjungi E-Warong dan memberikan arahan serta masukan dalam mengelola E-Warong, namun belum ada pelatihan formal untuk pengelola dan pendamping dalam mengembangkan E-Warong. Perubahan dalam kelembagaan yang menjadi permasalahan telah diperbaiki dengan memindahkan program E-Warong KUBE ke bidang Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial.

V. Daftar Pustaka

- Andi Samsu Alam & Ashar Prawitno. (2015). *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 93–104.
- Effendy, M. (2020). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*.
- Fatimah, S. A. (2018). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif (Gema Madani) di Kota Tasikmalaya*. 181–192.
- Kasmawati. (2019). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam*. VIII(2), 392–402.
- Mawardi, M. S., Ruhmaniyati, Tamyis, A. R., Usman, S., Kurniawan, A., & Budiani. (2017). *Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong Kube-PKH*. <http://staging.kompak.or.id/userfiles/media/20170223-e-warong-studyFinal.pdf%0Ahttp://www.smeru.or.id/id/content/kajian-awal-pelaksanaan-program-e-warong-kube-pkh>
- Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan